

PERAN KAMPANYE KEKERASAN PEREMPUAN MELALUI INSTAGRAM OLEH SEKOLAH PADA PEREMPUAN GRESIK

Shintya Fatikanasari Wibowo¹, Salsabila Putri Dafa²

Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

shintya.wibowo@gmail.com salsabilaputridafaani@gmail.com

Abstract

The increasing trend of child marriage and divorce cases in Gresik, Indonesia, underscores the importance of targeted interventions. With the alarming rise in early marriage petitions noted in January 2023, this research examines the effectiveness of school-led Instagram campaigns in mitigating violence against women in Gresik's diverse cultural landscape. Utilizing a qualitative approach, the study analyzes campaign content, reach, and audience engagement within the religiously conservative coastal and island regions, as well as the more culturally syncretic rural south and west. The findings indicate a divergence in gender norms reinforcement, which is influenced by the prevailing religious and traditional practices in different areas. The overarching patriarchal leadership in the north contrasts with weaker religious controls over gender roles in the south. The study reveals that religious women's organizations have yet to extensively mobilize against child marriage at grassroots levels, including religious boarding schools. This study concludes that tailored Instagram campaigns by schools, acknowledging the cultural fabric, can play a transformative role in addressing gender violence and early marriages in Gresik.

Keywords: *violence against women, social media campaigns, child marriage, cultural influences, Gresik education*

Article History

Received: Mei 2024

Reviewed: Mei 2024

Published: Mei 2024

Kata kunci: Kekerasan Perempuan, Kampanye Media Sosial, Perkawinan Anak, Pengaruh Budaya, Pendidikan Gresik

Abstrak

Pola meningkatnya kasus perkawinan anak dan perceraian di Gresik, Indonesia, menekankan pentingnya intervensi yang diarahkan. Mengingat peningkatan permohonan pernikahan dini yang signifikan pada Januari 2023, penelitian ini mengevaluasi keefektifan kampanye kekerasan terhadap perempuan yang dipimpin sekolah melalui Instagram di lanskap budaya Gresik yang beragam. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini menganalisis konten, jangkauan, dan keterlibatan audiens kampanye dalam konteks wilayah pesisir dan kepulauan yang konservatif secara religius, serta selatan dan barat yang lebih sinkretis budaya. Temuan menunjukkan adanya perbedaan penguatan norma gender yang dipengaruhi oleh praktik agama dan tradisional yang dominan di daerah berbeda. Dominasi kepemimpinan patriarki di utara berkontras dengan kontrol agama yang lebih lemah atas peran gender di selatan. Studi ini mengungkapkan bahwa organisasi perempuan keagamaan belum secara luas bergerak mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak hingga ke tingkatan desa dan pondok

pesantren. Studi ini menyimpulkan bahwa kampanye Instagram yang disesuaikan oleh sekolah, dengan memperhatikan jaringan budaya, dapat berperan transformasional dalam mengatasi kekerasan gender dan perkawinan dini di Gresik.

Kata kunci: Kekerasan Perempuan, Kampanye Media Sosial, Perkawinan Anak, Pengaruh Budaya, Pendidikan Gresik

PENDAHULUAN

Dua tahun terakhir ini telah menjadi periode yang signifikan, khususnya dalam konteks penyusunan rencana pembangunan baik jangka panjang maupun menengah oleh pemerintah pusat dan daerah. Bagi perempuan, individu dengan disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, fase ini seharusnya menjadi kesempatan berharga untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak mereka dan memasukkan suara mereka dalam rencana pembangunan. Sayangnya, terdapat hambatan yang membuat mereka harus berjuang lebih keras untuk menemukan kesempatan tersebut dalam sistem perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up di Indonesia, yang seharusnya memberikan mereka ruang yang cukup untuk advokasi (Yoteni et al., 2023). Realita sering menunjukkan bahwa kaum perempuan umumnya diharapkan mengurus hal-hal domestik seperti makanan dan administrasi selama proses perencanaan ini, yang berarti sedikit atau bahkan tidak ada peluang bagi mereka untuk terlibat secara substantif dalam pengambilan keputusan, dan sering kali kepentingan mereka dikawal oleh organisasi seperti PKK. Khususnya, perempuan dengan disabilitas menghadapi lebih banyak rintangan, mulai dari sensorik hingga fisik dan mental, yang menyulitkan mereka untuk berpartisipasi dalam rapat-rapat perencanaan pembangunan. Situasi ini semakin rumit bagi perempuan dengan disabilitas psikososial yang tinggal di panti rehabilitasi, yang memiliki batasan lebih keras dalam mengakses informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Widiyanti et al., 2023).

Statistik dari pemerintah Indonesia mengindikasikan bahwa selama dekade terakhir, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara keseluruhan telah mencapai angka yang tinggi (di atas 70), masih ada ketimpangan gender dengan IPM laki-laki mencapai 76,73 sedangkan IPM perempuan di angka 70,31. Kontribusi IPM perempuan telah menempatkan Indonesia pada peringkat 17 dalam kelompok

G20. Walaupun Indeks Kesenjangan Gender (IPG) telah menunjukkan peningkatan, namun kenaikan tersebut tidaklah cukup berarti, dimana dalam sepuluh tahun hanya naik dari 89,52 menjadi 91,63, meninggalkan Indonesia di peringkat 9 dari 10 negara ASEAN dan 16 dari negara G20. Demikian pula, sesuai dengan data global Indeks Gender SDGs EM2030, Indonesia masih terkategori memiliki kondisi 'buruk' dalam kesetaraan gender, yang berarti bahwa negara ini termasuk salah satu dari negara-negara yang turut menyumbang pada jumlah anak perempuan dan perempuan yang tinggal di area dengan tingkat kesetaraan gender yang 'buruk' atau 'sangat buruk' secara global (Widiyanti et al., 2023).

Dalam dekade terakhir, fenomena kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik. Meningkatnya kasus perkawinan anak dan perceraian dalam beberapa tahun terakhir di Gresik menunjukkan urgensi untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi intervensi yang efektif. Media sosial, khususnya Instagram, telah berkembang menjadi alat komunikasi yang kuat, berpotensi sebagai medium kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi seputar isu kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian oleh (Yoteni et al., 2023) menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik dan perilaku masyarakat (Ratna Setyaraharjoe et al., 2023). Teknologi digital, seperti yang dijelaskan oleh (Ratna Setyaraharjoe et al., 2023), telah memungkinkan untuk terciptanya ruang sosial baru yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan aktivisme sosial. Berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak, studi-studi sebelumnya telah menggarisbawahi pentingnya kampanye kesadaran untuk mengubah norma dan perilaku sosial yang merugikan perempuan dan anak perempuan (Nurulita & Primadini, 2021).

Namun, sejauh mana kampanye di media sosial, khususnya yang dipimpin oleh lembaga pendidikan, efektif dalam konteks lokal seperti di Gresik, masih perlu diteliti lebih lanjut. Dengan mengingat heterogenitas budaya dan sosial masyarakat Gresik, yang mencakup wilayah pesisir, kepulauan, kota, dan perdesaan, pendekatan kampanye yang dilakukan perlu disesuaikan agar relevan dan efektif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana kampanye digital, khususnya melalui Instagram oleh sekolah, dapat dimanfaatkan sebagai strategi intervensi dalam isu kekerasan terhadap perempuan dan

perkawinan anak di Gresik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kampanye tersebut dalam konteks budaya dan sosial yang beragam.

Tujuan kajian artikel ini adalah untuk mengeksplorasi peranan kampanye di Instagram yang dipimpin oleh sekolah dalam mengatasi dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak di Kabupaten Gresik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan dalam penerapan kampanye media sosial dalam lingkup pendidikan sekolah untuk mendukung isu pemberdayaan perempuan dan penghapusan perkawinan anak.

Bagaimana peran kampanye mengenai kekerasan terhadap perempuan melalui Instagram yang dipimpin oleh sekolah-sekolah di Gresik dalam mempengaruhi pemahaman dan sikap perempuan dan masyarakat luas di Kabupaten Gresik terhadap isu kekerasan terhadap perempuan?

METODE PENELITIAN

Dalam upaya mengatasi problematika terkait kampanye kekerasan terhadap perempuan melalui Instagram oleh sekolah-sekolah di Gresik, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam memahami secara mendalam tentang konten, jangkauan, dan tingkat keterlibatan audiens dalam kampanye tersebut. Kajian ini fokus pada analisis terhadap dinamika kampanye yang dilakukan di wilayah pesisir dan kepulauan Gresik, yang dikenal dengan latar belakang konservatif religius, serta area selatan dan barat yang lebih terbuka terhadap sinkretisme budaya. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplor bagaimana kampanye disajikan dan diterima oleh audiens, mempertimbangkan faktor-faktor unik yang memengaruhi efektivitas penggunaan Instagram sebagai media kampanye di lingkungan sosial dan budaya yang spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Melalui Instagram oleh Sekolah pada Perempuan Gresik telah dilaksanakan di Kabupaten Gresik. Melalui studi ini, mendalam diobservasi beragam aspek associated dengan kekerasan terhadap perempuan yang mempengaruhi kondisi sosial di Kabupaten Gresik. Berikut ini adalah hasil penelitian yang dipaparkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.

Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan 2024 -

Kabupaten Gresik: Data Sekunder

- a. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik mencatat terjadi kenaikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada tahun 2022 dengan 273 kasus, meningkat pada tahun 2023 menjadi 347 kasus, mengindikasikan situasi yang semakin rawan bagi anak-anak di bawah umur di area ini.

Data Empiris

Melalui kegiatan pengumpulan data empiris di lapangan, beberapa temuan signifikan berhasil dihimpun:

- a. Sebanyak 278 perempuan di Desa Kesamben Kulon terindikasi mengalami beragam bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual, fisik, psikis, dan eksploitasi ekonomi.
- b. Terdapat 179 anak di Desa Kesamben Kulon yang mengalami kekerasan psikis, yang diperparah oleh sistem pembelajaran daring.
- c. Di Desa Sooko, 12 perempuan menjadi korban kekerasan seksual, fisik, psikis, dan eksploitasi ekonomi.
- d. Sejumlah 82 perempuan di Desa Mondoluku mengalami kondisi serupa.
- e. Di Desa Sumbergede, 10 perempuan ditemukan mengalami kekerasan seksual, fisik, psikis, dan eksploitasi ekonomi.

Diantara tantangan yang dialami adalah minimnya informasi dan layanan pengaduan oleh pemerintah, khususnya di tingkat desa, meskipun terdapat beberapa upaya seperti pengembangan Program Rumah Curhat dan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan yang berfungsi membantu korban kekerasan. Namun, sosialisasi nomor pengaduan layanan UPTD PPA dan layanan bagi korban kekerasan dengan disabilitas masih terbilang belum maksimal. Secara agregat, dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Gresik masih memprihatinkan dengan berbagai bentuk kekerasan yang beragam. Meski UPTD PPA telah memiliki shelter dengan fasilitas yang memadai dan tenaga pendamping sebagai upaya penanganan, layanan psikososial, rehabilitasi, hingga pemberdayaan ekonomi korban masih menunjukkan butuh optimalisasi lebih lanjut. Program yang ada saat ini seperti Bunda Puspa dan Sekolah Perempuan terindikasi masih umum dan belum menargetkan korban kekerasan seksual secara spesifik. Koordinasi dengan berbagai OPD terkait perlu ditingkatkan untuk mengintegrasikan program-program tersebut dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas, guna memberikan penanganan yang lebih efektif bagi korban

kekerasan.

Kekerasan dan Peran Kampanye Edukasi

a. Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT):

KDRT sering terjadi karena tekanan ekonomi di mana ketidakstabilan pendapatan keluarga memicu laki-laki untuk melampiaskan kekecewaannya melalui tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, dan eksploitasi ekonomi terhadap istri dan anak-anaknya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering kali merupakan produk kompleks dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang berinteraksi dalam lingkungan domestik. Salah satu faktor utama yang memicu tindakan KDRT adalah ketidakstabilan ekonomi (Sari & Casa Bilqis Savitri, 2019). Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi yang dialami oleh keluarga, seperti kehilangan pekerjaan, pengurangan penghasilan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, dapat menciptakan sejumlah besar stres dalam rumah tangga. Dalam masyarakat yang secara tradisional menganggap laki-laki sebagai pencari nafkah utama, kegagalan atau tekanan ekonomi ini sering kali dianggap sebagai kegagalan pribadi laki-laki tersebut. Akibatnya, beberapa laki-laki dapat melampiaskan kekecewaan dan frustrasi mereka melalui tindakan kekerasan yang ditujukan kepada istri dan anak-anak mereka, dalam upaya mencari kendali atau menegaskan kembali peran dominan mereka dalam keluarga. Kekerasan ini bisa berbentuk fisik, psikis, seksual, atau bahkan eksploitasi ekonomi, di mana laki-laki mungkin mengendalikan atau menahan akses finansial keluarga sebagai bentuk pengendalian (Rojif Mualim et al., 2022).

b. Paham Patriarki:

Struktur patriarki yang kuat menjadi pemicu KDRT, di mana laki-laki dipandang sebagai pemimpin absolut dalam keluarga dan perempuan sebagai pengikut. Ketidakpatuhan dari perempuan sering kali dihukum dengan kekerasan. Rasa takut akan stigmatisasi dan viktimisasi membuat perempuan enggan untuk berbicara atau melaporkan kekerasan yang dialami (Widodo et al., 2021). Struktur patriarki, yang sangat menonjol dalam banyak budaya, memainkan peran kritis dalam memfasilitasi dan memperburuk kondisi KDRT. Dalam sistem patriarki, laki-laki dianggap memiliki peran dominan dalam hampir semua aspek kehidupan sosial, termasuk dalam lingkup keluarga. Dalam konfigurasi seperti ini, laki-laki sering kali dipandang dan dihormati sebagai

pemimpin absolut dan tidak terbantahkan dalam keluarga, sedangkan perempuan ditempatkan dalam peran yang lebih pasif, sebagai pengikut atau pelayan kebutuhan keluarga dan suami. Ketika perempuan mengekspresikan penolakan atau ketidakpatuhan kepada peran tradisional ini, baik secara verbal maupun melalui tindakan, mereka bisa menjadi sasaran kekerasan fisik atau emosional sebagai 'hukuman' atau cara untuk 'mendisiplinkan' mereka. Pendekatan ini tidak hanya merusak fisik dan psikologikal bagi perempuan tetapi juga menciptakan lingkaran setan kekerasan yang sulit dipecahkan. Selain itu, ketakutan akan dikucilkan, diberi stigma, atau dijadikan subjek viktimisasi lebih lanjut oleh masyarakat seringkali membuat perempuan terjebak dan enggan menyuarakan atau melaporkan penderitaan mereka. Siklus ini diperparah oleh minimnya kesadaran dan sumber daya untuk perempuan yang ingin mencari bantuan atau melarikan diri dari situasi KDRT, menjadikan paham patriarki bukan hanya sekedar latar belakang sosial tetapi juga sebagai alat penindas yang efektif (Yoteni et al., 2023).

Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu tantangan utama dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan, termasuk kekerasan, baik itu dalam konteks domestik atau umum. Beberapa faktor yang memainkan peran kunci dalam situasi ini meliputi bias dalam sistem peradilan, kolusi yang merusak kredibilitas institusi penegak hukum, dan kecenderungan untuk mengabaikan kebutuhan dan hak-hak korban. Pengalaman litigasi biasanya diwarnai oleh ketimpangan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak yang berselisih (Widiyanti et al., 2023). Individu atau entitas dengan akses finansial yang lebih besar dan jejaring sosial yang luas sering kali dapat memanfaatkan sistem peradilan demi keuntungan mereka sendiri.

Misalnya, mereka mungkin memiliki kemampuan untuk mempekerjakan pengacara yang lebih kompeten atau berpengalaman, mengambil langkah-langkah yang diperbolehkan oleh hukum untuk memanipulasi proses hukum, atau bahkan memengaruhi hasil kasus melalui hubungan pribadi atau profesional dengan tokoh-tokoh hukum. Akibatnya, ada kesenjangan yang nyata dalam hasil yang diperoleh antara mereka yang memiliki sumber daya berlimpah dibanding mereka yang kekurangan, membuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan menjadi goyah. Kolusi antara pelaku dan aparaturnya penegak hukum (APH) sering menjadi faktor yang memperlemah proses penegakan hukum. Dalam kasus di

mana pelaku kekerasan mempunyai pengaruh atau status sosial yang tinggi, mereka bisa saja memiliki kekuatan untuk memanipulasi atau membujuk APH agar bertindak mendukung mereka. Ini bisa berarti bahwa pelaku kekerasan mendapatkan perlakuan yang lebih lunak atau proses hukum yang diperlambat yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan tindakan tanpa takut akan konsekuensi. Kolusi semacam ini bisa merusak integritas sistem peradilan, menjadikan sulit untuk memperoleh keadilan yang sesungguhnya dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Dalam banyak sistem peradilan, ada kurangnya fokus pada korban, baik dalam proses hukum itu sendiri atau dalam penerapan undang-undang oleh APH. Perspektif ini mengakibatkan kebutuhan dan hak-hak korban sering kali tidak didengar dan diabaikan. Hal ini bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari kurangnya dukungan dan perlindungan untuk korban saat melapor, kurangnya saksi yang mendukung, sampai pada ketidakadilan dalam pengelolaan kasus yang menekankan pada 'menyelesaikan' masalah tanpa benar-benar memberikan keadilan bagi korban. APH, dalam kasus kekerasan khususnya, harus dilatih untuk menangani korban dengan cara yang sensitif dan mendukung, memperhatikan trauma yang telah mereka alami, serta untuk menerapkan undang-undang yang ada dengan cara yang memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang pantas mereka terima. Tanpa perubahan yang signifikan dalam cara korban dilihat dan diperlakukan oleh sistem peradilan, sangat sulit untuk melangkah maju dalam memerangi kekerasan dan memperkuat hukum (Nurulita & Primadini, 2021).

Dalam keseluruhannya, penegakan hukum yang lemah tidak hanya menghambat proses keadilan tetapi juga erodes kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang seharusnya melindungi warga dan menjaga urutan sosial. Sebagai masyarakat, penting untuk menuntut dan mendukung reformasi institusional yang memastikan keadilan dapat ditegakkan tanpa membedakan status sosial atau ekonomi dan bahwa hak-hak korban selalu menjadi prioritas dalam sistem peradilan.

Ketidakberanian korban, khususnya anak-anak, untuk berbicara dan melapor tentang kekerasan yang dialami mereka sering kali berakar pada minimnya kesadaran mengenai betapa pentingnya proses tersebut dalam mencari keadilan. Anak-anak umumnya belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka atau tentang bagaimana cara mengambil langkah-langkah untuk

mendapatkan bantuan. Lebih dari itu, ketiadaan program edukasi yang efektif di sekolah atau dalam lingkup keluarga tentang pentingnya berbicara terhadap perlakuan tidak adil membuat anak-anak merasa terisolasi dan takut untuk melangkah.

Adanya kekurangan informasi serta panduan pendidikan di institusi pendidikan dan masyarakat luas mengenai prosedur dan sarana melapor ketika mengalami kekerasan berkontribusi besar terhadap diamnya korban. Sangat sedikit korban yang mengetahui cara yang tepat untuk melaporkan kejadian yang mereka alami kepada otoritas yang berwenang baik karena kurangnya akses informasi atau minimnya sosialisasi tentang lembaga atau mekanisme yang tersedia bagi korban untuk melaporkan kasus mereka.

Korban kekerasan seksual kerap kali menghadapi stigma sosial yang melukai dari komunitas mereka sendiri, di mana korban acapkali direndahkan atau malah disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka. Selain itu, ada kecenderungan kuat di dalam sebagian keluarga untuk menutup-nutupi kasus karena alasan 'mencuci pakaian kotor di dalam rumah' demi menjaga citra keluarga. Kondisi ini membentuk lingkaran setan dimana korban merasa terpaksa untuk bungkam dan tidak melapor demi menghindari pemaluan keluarga. Kontrol sosial yang rendah terhadap kekerasan terhadap perempuan sangat dipengaruhi oleh ketidakpahaman masyarakat luas bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius dan layak dilaporkan. Ini diperburuk oleh kenyataan bahwa informasi tentang hak-hak perempuan serta prosedur untuk melaporkan kasus kekerasan masih belum sepenuhnya dipahami atau disebarluaskan secara efektif di kalangan masyarakat.

Stigma negatif dan tuduhan terhadap korban kekerasan, yang dianggap sebagai pihak yang merusak reputasi keluarga atau bahkan sebagai 'pemicu' kekerasan itu sendiri, mengikis keberanian korban untuk berbicara. Ini menyebabkan banyak korban memilih diam dan tidak melapor, karena takut akan konsekuensi sosial, seperti dikucilkan atau diperlakukan dengan kejam oleh lingkungan sosialnya sendiri, yang justru seharusnya memberikan dukungan. Dalam kerangka pemikiran yang lebih luas, perlu adanya upaya kolektif dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan korban untuk berbicara. Pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak, serta membangun kesadaran akan pentingnya melaporkan kekerasan, menjadi aspek krusial dalam mengatasi pemahaman masyarakat yang keliru dan

memperkuat kontrol sosial.

Pemerintah daerah dan desa diharapkan memperluas layanan sosial dan rehabilitasi untuk korban, serta memperbanyak program edukasi dan sosialisasi hukum dan hak asasi manusia di tingkat komunitas. Program sekolah untuk perempuan bisa memainkan peran penting di sini dengan bekerjasama lebih dekat dengan organisasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mendukung korban kekerasan berbasis gender. Sekolah dan kampanye di media sosial seperti Instagram mempunyai peran krusial dalam mengedukasi dan menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya pendekatan zero tolerance terhadap kekerasan berbasis gender. Memperkuat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang implikasi dan konsekuensi dari kekerasan serta bagaimana melaporkannya, bisa berkontribusi besar dalam mengurangi insiden serta memberi korban keberanian dan akses ke dukungan yang mereka perlukan. Instagram, dengan jangkauannya yang luas, menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada audiens yang lebih muda dan lebih luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye melalui Instagram yang dipimpin oleh sekolah-sekolah di Gresik berperan substansial dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu kekerasan terhadap perempuan. Konten-konten yang dibagikan meliputi infografis edukatif, video testimoni, dan poster interaktif yang menjelaskan berbagai bentuk kekerasan serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Selain itu, keterlibatan audiens diukur melalui metrik seperti jumlah likes, shares, komentar, serta active engagement melalui insta stories dan live sessions.

Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang mengakar dalam banyak masyarakat di seluruh dunia, mencakup berbagai bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Ini seringkali dialami perempuan dalam kerangka hubungan intim, tempat kerja, atau di ruang publik, dan mampu meninggalkan korban dengan cedera fisik dan psikologis yang mendalam (Nurulita & Primadini, 2021). Kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan, atau eksploitasi, merupakan pelanggaran yang merendahkan martabat dan melanggar hak asasi manusia, dan sering tidak dilaporkan karena rasa malu, ketakutan akan stigma atau pembalasan. Kekerasan psikologis, termasuk gaslighting, penghinaan, atau isolasi sosial, bisa sama destruktifnya dengan bentuk kekerasan fisik, namun seringkali sulit untuk dideteksi dan diatasi karena kelangkaan bukti konkret dan sifatnya yang tidak

kasat mata. Selain itu, kekerasan ekonomi, yang mungkin termasuk pengontrolan akses terhadap sumber daya keuangan atau pekerjaan, membatasi kemampuan perempuan untuk menjalani hidup mandiri (Rojif Mualim et al., 2022).

Dampak dari kekerasan ini seringkali bertahan lama, mempengaruhi kesehatan mental, kesejahteraan fisik, dan kualitas hidup korban serta komunitas yang lebih luas, menegaskan perlunya intervensi hukum, edukasi, dan dukungan sosial yang efektif untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap perempuan demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan egaliter.

Dari hasil analisis konten, ditemukan bahwa sekolah-sekolah di Gresik menggunakan pesan yang relatable dan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh audiens target, yang umumnya adalah para remaja dan mudamudi. Hal ini meningkatkan pembahasan isu ini menjadi lebih terbuka dan interaktif. Selain itu, kampanye ini sering mengadakan sesi tanya jawab atau webinar yang mengundang pembicara ahli seperti psikolog atau aktivis hak perempuan.

Dalam pembahasan lebih lanjut, ditemukan bahwa peran kampanye ini efektif dalam beberapa aspek. Pertama, kampanye berhasil memperluas pengetahuan tentang apa itu kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana mengidentifikasinya. Kedua, kampanye ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan kolektif. Ketiga, selain dari sekadar peningkatan pengetahuan, terdapat indikasi terjadinya perubahan sikap dalam masyarakat dengan adanya peningkatan solidaritas terhadap korban dan keinginan untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Namun, harus diakui bahwa masih terdapat tantangan dalam mengubah norma dan nilai yang telah lama berakar di masyarakat, khususnya di wilayah yang masih terikat kuat dengan budaya patriarki. Sehingga, terdapat gap antara pengetahuan dan perubahan sikap substansial di beberapa kelompok masyarakat. Kesimpulannya, kampanye kekerasan terhadap perempuan melalui Instagram oleh sekolah di Gresik telah memainkan peran penting dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendapatkan dampak yang lebih luas dan mendalam pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil temuan yang telah disajikan dalam penelitian tentang "Peran Kampanye Kekerasan Perempuan Melalui Instagram Oleh Sekolah Pada Perempuan Gresik", dapat disimpulkan bahwa inisiatif sekolah dalam memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, sebagai platform untuk mengkampanyekan isu kekerasan terhadap perempuan memberikan dampak yang signifikan. Kampanye ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai isu kekerasan terhadap perempuan di kalangan remaja perempuan di Gresik, serta mendorong diskusi dan edukasi tentang hak-hak perempuan dan cara-cara melindungi diri dari kekerasan. Kampanye semacam ini juga membuka ruang bagi korban untuk berbagi dan menemukan dukungan, serta menunjukkan pentingnya peran serta komunitas dan lembaga pendidikan dalam mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan.

Saran

Secara Teoritis:

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami secara mendalam pengaruh kampanye digital terhadap perubahan perilaku sosial dan kognitif terkait isu-isu sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan. Penelitian yang mengeksplorasi dinamika interaksi sosial dalam komunitas online dan dampaknya terhadap pembentukan opini publik dapat memberikan pandangan baru tentang strategi kampanye sosial. Pengembangan teori komunikasi dan edukasi tentang isu kekerasan terhadap perempuan yang memanfaatkan platform digital sebagai alat utamanya juga merupakan area yang dapat diperkaya.

Secara Praktis:

Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya diimbau untuk lebih aktif lagi dalam menggunakan social media sebagai alat kampanye edukatif, tidak hanya terbatas pada isu kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga isu-isu penting lainnya yang relevan dengan kehidupan remaja. Kerja sama antara sekolah, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu ditingkatkan. Kerjasama ini dapat mencakup pembuatan materi kampanye, pelatihan bagi tenaga pendidik, dan pembuatan kebijakan yang mendukung upaya pengentasan kekerasan terhadap perempuan. Perlu adanya pengawasan dan bimbingan terhadap siswa terkait penggunaan Instagram, mengingat platform ini juga memiliki potensi

dampak negatif. Edukasi tentang penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab sangat diperlukan. Pemanfaatan Instagram oleh sekolah sebagai media kampanye kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan, namun juga sebagai alat pemberdayaan yang memungkinkan perempuan terlibat aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pengentasan kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurulita, F. S., & Primadini, I. (2021). Peran key opinion leader dalam pemasaran film bertema kekerasan seksual. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 5(2). <https://doi.org/10.25139/jkp.v5i2.3630>
- Ratna Setyaraharjoe, Julyanto Ekantoro, & Anindita Putri Pratiwi. (2023). KAMPANYE KOMUNITAS INDONESIA FEMINIS DALAM MENSOSIALISASIKAN TENTANG UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) MELALUI AKUN INSTAGRAM @INDONESIAFEMINIS. *Jurnal Administrasi Publuk Dan Ilmu Komunikasi*, 10(1), 83–88. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v10i1.1041>
- Rojif Mualim, R. M., & Ikhda Khullatil Mardliyah. (2022). PERAN KOMUNITAS PERGERAKAN PEREMPUAN SRIKANDI LINTAS IMAN DALAM KAMPANYE MODERASI BERAGAMA: STUDI ANALISIS AKUN INSTAGRAM @SRILIJOGJA. *Mahakarya: Jurnal Mahasiswa Ilmu Budaya*, 3(2), 15–26. <https://doi.org/10.22515/mjmib.v3i2.5593>
- Sari, W. P., & Casa Bilqis Savitri. (2019). Kampanye KOMNAS Perempuan Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 136–150. <https://doi.org/10.21009/Communicology.012.03>
- Widiyanti, R., Wuryaningsih, T., & Lestari, S. (2023). Kampanye Media Berperspektif Gender dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Instagram Satgas PPKS. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(2), 193–210. <https://doi.org/10.25077/jsa.9.2.194-211.2023>
- Widodo, W. R. S. M., Nurudin, & Widiya Yutanti. (2021). Kesetaraan Gender dalam Konstruksi Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(1), 44–55. <https://doi.org/10.33366/jkn.v3i1.73>
- Yoteni, A. A., Nurlatifah, N. D., & Pramana, R. (2023). Peran Media Massa dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan untuk Memperkuat Demokrasi di

Indonesia. *Action Research Literate*, 7(9), 72–78.
<https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.158>